

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Oleh :

Raddana

Dosen IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat

Abstract

Empowerment is an attempt to make people, groups or communities become more empowered so that they can take care of their interests independently. As we know, that in the implementation of PNPM-MP should involve community participation as an essential element. However, the implementation in the field, PNPM-MP faced with the problem of minimal participation of the community. This will result in less optimal implementation of PNPM-MP in Sukarara, Jonggat, Central Lombok.

The writer interested in conducting research with the title of PNPM-MP in Improving Welfare of the Poor with the formulation of the problem: (1) How is the implementation (2) What are the barriers and factors supporting the implementation and (3) what the government's efforts to overcome obstacles of PNPM-MP in improving the welfare of the poor in Sukarara, Jonggat, Central Lombok.

This study uses descriptive qualitative research method, the writer did not use the sample population. The writer is using purposive informants as a source of primary data and documents as a source of secondary data. To support ongoing research, writer uses a variety of secondary data in order to support the completeness of the data required in this study.

The results of the study: (1). PNPM-MP can be broadly improve the welfare of the poor due to open employment opportunities through development of infrastructure. (2). Barriers in general practice: Human resources is still low, procurement of materials/goods to be auctioned, disbursements are often not timely, lack of socialization and development and (3) Supporting the management of the program is already well organized from the central, provincial, regency, districts and villages (4) efforts by the government is directing the public to increase their knowledge and skills.

Keywords: *Implementation, PNPM-MP, Welfare of the Poor*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, pembangunan nasional harus dilaksanakan di

segala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor keamanan. Guna mencapai semuanya itu diperlukan peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan.

Pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang diluncurkan oleh Presiden RI tanggal 30 April 2007 di Kota Palu-Sulawesi Tengah, sesungguhnya merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga. Pada saat diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari: PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum.

PNPM-MPd pada hakekatnya adalah gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya dalam rangka peningkatan pembangunan fisik. Tujuan umum PNPM-MPd seperti pembangunan sarana prasarana umum dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan tujuan khusus PNPM-MPd antara lain adalah meningkatkan penghasilan kelompok masyarakat miskin dan meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, dan kelompok lainnya yang selama ini terpinggirkan.

Pemberdayaan (*empowering*) adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga

mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Pelaksanaan PNPM-MPd di Kecamatan Jonggat dalam rangka meningkatkan pembangunan prasarana umum selama ini, masih menemui berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih minimnya anggaran yang dialokasikan bagi pelaksanaan PNPM-MPd di Kecamatan Jonggat. Dana tersebut secara kuantitas belum dapat memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan sarana umum secara optimal, sehingga menjadi penghambat Pemerintah Kecamatan Jonggat dalam upaya meningkatkan pembangunan prasarana umum secara optimal.

Masalah lain yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Jonggat yakni kurang tepatnya sasaran pembangunan yang dilaksanakan. Seringkali pembangunan yang dilaksanakan hanya didasarkan pada daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, padahal dalam kenyataannya banyak masyarakat yang berada di pinggiran yang lebih membutuhkan terlaksananya kegiatan PNPM-MPd tersebut. Hal ini, menjadi masalah yang krusial, dikarenakan kegiatan pembangunan yang dilakukan tersebut tidak memperhatikan aspek prioritas.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MP sudah seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, PNPM-MP di Kecamatan Jonggat dihadapkan pada masalah minimnya keikutsertaan masyarakat. Hal ini berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Jonggat.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan PNPM-MPd dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah”

Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam pengamatan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan PNPM-MPd dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat.
2. Apa saja hambatan dan faktor pendukung pelaksanaan PNPM-MPd di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat.
3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan PNPM-MPd dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat.

Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian adalah untuk mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, seperti penyediaan dan perbaikan prasarana umum yang semuanya mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

Pelaksanaan

Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:20) mengemukakan bahwa “*Implementation* (pelaksanaan) dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*)”. Sedangkan Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) mendefinisikan *implementation* (pelaksanaan) secara lebih spesifik, yaitu

Kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana/implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya diharapkan akan

muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Dalam memahami implementasi (pelaksanaan) tidak hanya membahas bagaimana upaya yang dilakukan implementer dalam mewujudkan tujuan kebijakan, hal tersebut dikarenakan implementasi (pelaksanaan) merupakan sebuah tahapan yang kompleks yang panjang, dimana tahapan tersebut dimulai sejak kebijakan memiliki payung hukum yang sah, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengarahkan orang, sumber daya teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan, Purwanto dan Sulistyastuti (2012:64). Lanjutnya dikemukakan bahwa “Implementasi (pelaksanaan) akan menghasilkan *policy outcomes* apabila telah melalui proses yang kompleks. Yang dimaksud *policy outcomes* yakni kondisi dimana implementasi (pelaksanaan) tersebut menghasilkan realisasi yang berdampak pada tercapainya tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dampak yang paling nyata adalah adanya perubahan kondisi yang dirasakan oleh kelompok sasaran yakni kondisi satu (misalnya miskin dan tidak sejahtera) menjadi kondisi yang lain yang lebih baik (misalnya makmur dan sejahtera)”.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 85) mengemukakan enam variabel untuk mengukur keberhasilan sebuah implementasi (pelaksanaan), yaitu:

- a. Kualitas kebijakan
- b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran)
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan
- d. Kapasitas implementor
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran
- f. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana kebijakan diimplementasikan

PNPM-MP

Pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari: PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum.

PNPM-MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM-MP dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

1. Tujuan Umum PNPM

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2. Tujuan Khusus PNPM

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan

kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

- e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna,

Prinsip-Prinsip Dasar Pendekatan PNPM-MP adalah:

- a. Menggunakan Kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
- b. PNPM-MP menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini.
- c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

Ruang lingkup kegiatan PNPM-MP mencakup bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi:

- a. Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, sosial ekonomi secara padat karya.
- b. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, khususnya diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir.
- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang

bertujuan mempercepat pencapaian target *MDGs*

- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya untuk mendorong pembangunan yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan melalui beberapa pendekatan yaitu:

- a. Partisipatif, yaitu adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta keterlibatannya dalam tahap pelaksanaan program, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan hingga program dapat berlanjut.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, yaitu menitikberatkan pada peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengembangkan pembangunan sebagaimana secara mandiri.
- c. Pelaksanaan kegiatan secara kelompok secara swakelola dan berkelompok yaitu memberikan peluang kepada masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok dengan mengembangkan potensi yang ada dan mendorong agar berkembang secara mandiri.
- d. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat untuk masyarakat, dan hasilnya menjadi bagian perencanaan di tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan secara nasional.

Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan yang direncanakan menuju keadaan optimal yang dicita-citakan masyarakat. Proses perubahan ini merupakan proses perubahan yang menyeluruh dan meliputi berbagai aspek kehidupan.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian tidak hanya mengejar kemajuan fisik atau lahiriah saja atau mengejar kepuasan batiniah saja, tetapi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya.

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur social, sikap mental, dan kelembagaan dan termasuk didalamnya pengurangan dan pemberantasan kemiskinan, Suryana (2000)

Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan diartikan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar dalam suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembangunan bangsa”.

Ukuran Keberhasilan Pembangunan (Budiman, 1996):

- a. Kemampuan social ekonomi masyarakat meningkat
- b. Terjadi pemerataan pendapatan
- c. Kemampuan sumber daya manusia dan kualitas hidup baik
- d. Terjadi kelestarian lingkungan hidup
- e. Tercipta keadilan social dan kesinambungan pembangunan

Prasarana Umum

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Moenir (1992: 119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu

proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pengertian di atas, sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
- b. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
- c. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
- d. lebih memudahkan /sederhana dalam jarak para pengguna atau pelaku
- e. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
- f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- g. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Kecamatan

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten /kotamadya yang terdiri atas desa dan kelurahan. Dalam hal otonomi daerah, kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kotamadya yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan.

Dalam konteks ekonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Istilah "Kecamatan" di Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan "Sagoe Cut" sedangkan di Propinsi Papua disebut dengan istilah "Distrik". Kecamatan merupakan wilayah yang strategis dalam pemerintahan daerah, yang langsung berinteraksi memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana didalam pembentukannya ada beberapa persyaratan yang mana telah diatur dalam Kepmendagri Nomor 4 tahun 2000.

Tinjauan Normatif Yang Relevan Dengan Fenomena

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alinea ke-IV dalam UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, maka pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan berbagai kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya dengan menjalankan program-program dari pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang pelaksanaan otonomi. Dimana kebijakan yang diambil menyebabkan perubahan manajemen dari sentralistik menjadi desentralistik yang menitikberatkan pada pemberdayaan daerah. Sehingga orientasi pembangunan berubah dari sektoral menjadi kewilayahan, dengan orientasi penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan.

3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2007

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

- a. PNPM-MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM-MP dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan, pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

4. Keputusan Bupati Lombok Tengah

PNPM-MP sebagai program nasional mulai bergulir sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Keputusan ini ditanggapi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui keluarnya Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 132 tahun 2012 tentang Penetapan Pengurus

Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Operasional Kegiatan dan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MP dan PNPM Integrasi tanggal 27 Maret 2012 yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Sugiyono (2008: 3) mengungkapkan bahwa setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penelitian dimana terdapat sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah diketahui sebelumnya diartikan sebagai penemuan. Pada sudut pandang yang berbeda dimana penelitian yang berusaha memastikan kebenaran terhadap sesuatu yang selama ini dianggap masih abu-abu, tidak jelas dan penuh dengan keraguan diartikan sebagai penelitian pembuktian. Sedangkan penelitian yang memperdalam hasil sebelumnya, mengupas lebih tajam dan lebih jelas terhadap hasil penelitian sebelumnya diartikan sebagai penelitian pengembangan. Melalui penelitian, setiap insan manusia pada dasarnya adalah berusaha mencari jawaban tentang masalah yang selama ini masih merupakan sebuah tanda tanya besar bagi individu itu sendiri.

Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian yang difokuskan oleh peneliti adalah Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dalam meningkatkan pembangunan prasarana umum di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2013 : 157) menyebutkan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” . Maka Sumber data dapat diidentifikasi menjadi 3 macam yang lebih dikenal dengan 3P, yaitu :

- a. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan melalui wawancara atau melalui jawaban tertulis melalui angket. *Person* merupakan tempat peneliti bertanya mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu sumber data ini adalah berupa orang per orang yang dapat dijadikan sumber penelitian melalui wawancara dengan informan yaitu pihak-pihak yang peneliti jadikan narasumber dalam penelitian ini. Adapun beberapa orang atau *person* yang dijadikan informan dalam wawancara yakni:
- 1) Informan pertama, adalah Kepala Desa Sukarara, Bapak Timan.
 - 2) Informan kedua, adalah Sekretaris Desa Bapak Jumasre, S.Ip
 - 3) Informan ketiga, adalah Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bapak Sahwan Yuliadi.
 - 4) Informan keempat, adalah Ketua Panitia Lelang pengadaan bahan, alat dan jasa Bapak H.Saman Budi, S.Ag.
 - 5) Informan kelima, adalah Ketua TPU (Tim Penulis Usulan) Bapak Titin.P.N
 - 6) Informan keenam, adalah Ketua KPMD Bapak Suhirman
- b. *Place*, sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. Sumber data berbentuk place berupa ruang, laboratorium (yang berisi perlengkapan), bengkel, kelas dan sebagainya tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Pertamanan Kota Mataram..
- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data atau tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan, buku-buku pedoman yang berhubungan dengan implementasi kebijakan, kedisiplinan dan manajemen sumber daya manusia serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti dapat pada saat penelitian langsung ke tempat penelitian.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan sebagai sumber penelitian adalah sebagai berikut:

- a. *Data Primer*
Menurut Silalahi (2012: 289) bahwa untuk beberapa proyek penelitian, sumber data adalah penting untuk menggunakan sumber primer (primary sources). Sumber primer adalah suatu objek dokumen original – material mentah dari pelaku yang disebut “first-hand information”. Data yang dikumpulkan dari situasi actual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Individu, kelompok focus, dan satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber data primer. Data atau sumber primer antara lain meliputi dokumen historis dan legal, hasil dari suatu eksperimen, data statistik, lembaran-lembaran penulisan kreatif, dan objek-objek seni.
- b. *Data Sekunder*
Silalahi (2012: 291) merumuskan bahwa Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original dan dapat disebut juga sebagai “second-hand information”. Bulletin statistik, laporan-laporan, atau arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dan tersedia dari dalam atau luar organisasi, analisis-analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survey terdahulu yang dipublikasikan, data bases yang ada dari penelitian terdahulu, catatan-catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi dan catatan-catatan perpustakaan juga merupakan sumber data sekunde.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008: 224), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” Teknik pengumpulan data yaitu usaha yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi – informasi yang berhubungan erat dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga data yang diperoleh bersifat *valid* (menggambarkan yang sebenarnya), *reliable* (dapat dipercaya), dan *objective* (sesuai dengan kenyataan). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi :

Dokumentasi

Basrowi dan Suwandi (2008: 158) mengemukakan bahwa metode telaah dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian ini bahwa peneliti berusaha mendapatkan data yang valid yang berkenaan dengan jumlah pemasukan pajak dari sektor reklame, perkembangan pajak dari sektor reklame, jumlah reklame yang terpasang di Kota Mataram, status ijin dari reklame yang ada di Kota Mataram, prosedur perijinan serta jumlah reklame liar yang terjaring penertiban.

Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi berperan serta (*participant observation*) dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi berperan serta (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian informan. (Juliansyah Noor, 2011 : 140).

Wawancara

Menurut Moleong (2013: 186), “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu interviewer dan interviewee.”

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi dari subyek penelitian. Teknik wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan memakai pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai instrumen. Pedoman wawancara sebagai penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan yang ditentukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dimana peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara yang berisi garis besar pertanyaan dari penelitian.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2008: 223) instrumen penelitian adalah :

The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has product.

Pengertian di atas mengandung artian bahwa Instrumen dalam penelitian naturalistik adalah manusia. Bentuk lain dari instrumen selain manusia dapat digunakan pada tahap penelitian selanjutnya, tetapi manusia adalah instrumen utama dan seterusnya. Tetapi jika instrumen manusia telah digunakan secara luas dalam tahap awal penelitian, instrumen lain selanjutnya dapat dibangun berdasarkan pada data yang dihasilkan oleh manusia.

Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan bagian yang sangat penting untuk memberikan makna yang berguna dalam memecahkan makna penelitian

dan mencapai tujuan akhir dari penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010: 248), analisis data kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Aktivitas dan Analisis Data menurut model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 247) adalah “*Data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification.*”

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
- b. *Data Display* (Penyajian Data)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Sukarara

Desa ini masih tergolong desa yang menjadikan tenun tradisional sebagai urat nadi ekonomi mereka. Hal ini dibuktikan, banyaknya masyarakat desa tersebut memiliki *Art Shop* (toko/kios tenunan songket). Setidaknya, setiap satu rumah memiliki satu set peralatan alat tenun tradisional. Penyebabnya tidak lain, karena desa ini salah satu objek pariwisata yang dekat dengan kota Praya. Selain itu, Desa Sukarara ini juga dekat dengan jalur Bandara Internasional Lombok. Oleh sebab itu, jika tourist manca negara mengunjungi Lombok dapat dengan mudah mampir di sini. Secara geografis Desa Sukarara ini memiliki luas sekitar 755 ha/m² dan berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah utara: berbatasan dengan Desa Puyung, Desa Nyerot, dan Desa Batutululis
- b. Sebelah selatan: berbatasan dengan Desa Batujai.
- c. Sebelah barat: berbatasan dengan Desa Labulia, dan Desa Ungga.
- d. Sebelah timur: berbatasan dengan Desa Puyung.

Kependudukan Desa

Desa yang terletak di daerah pinggiran jalan Bandara Internasional Lombok ini mempunyai jumlah penduduk sebanyak 10.848 jiwa dan 3.408 kepala keluarga.

Pemerintahan Desa

Berikut struktur organisasi pemerintahan di Desa Sukarara pada periode 2013-2020 (diambil dari profil desa):

Struktur pemerintahan Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat (Gambar 1), Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukarara (Gambar 2) dan Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sukarara adalah struktur organisasi pemerintahan yang terbaru yaitu hasil pemilihan desa tahun 2013.

Menurut informasi yang dapat kami himpun dari Kepala Desa Sukarara, Timan, sedikitnya sudah ada 18 (delapan belas) pejabat yang telah memimpin desa ini. Berikut

ini adalah urutan pejabat desa dari masa ke masa:

Adapun mengenai visi dan misi Desa Sukarara, tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2015 Sebagai berikut:

Visi Desa Sukarara yaitu: "Terwujudnya masyarakat Desa Sukarara yang beriman, berbudaya, mandiri, aman, sejahtera, produktif, demokratis"

MISI Desa Sukarara adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Desa yang beriman, bertaqwa, berbudaya luhur, dan aman.
2. Mewujudkan masyarakat Desa yang demokratis dan berkesadaran hukum selaras dengan misi mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
3. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif dan sejahtera.

Hasil Penelitian

Perencanaan Kegiatan PNPM-MPd

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalan gagasan sampai dengan musdes perencanaan disebut dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan (PTO PNPM-MPd: 26)

MAD (Musyawarah Antar Desa) sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdes

Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebaran informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Hasil yang diharapkan dalam musdes sosialisasi adalah sebagai berikut: Tersosialisasinya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tujuan, prinsip kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat desa; Dipahaminya kebijakan tentang pemetaan RTM, pembentukan BKAD, penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, pola penyampaian informasi; Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi, dll. Hal ini dibenarkan oleh Sekdes Sukarara (Jumasre, S.Ip)

Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalan gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPM D/K akan mendapat pelatihan. Hasil yang diharapkan dalam pelatihan KPM D/K adalah Dipahaminya latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan; Dipahaminya peran dan tugas KPM D; Bertambahnya keterampilan melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk perencanaan secara partisipatif seperti dijelaskan oleh naggota KPMD (Mipaya Rahmah)

Tahap awal dari proses penggalan gagasan adalah mengadakan pertemuan di dusun untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga dusun setempat. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembuatan peta sosial dalam pertemuan dusun sebagai berikut :

- a. Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan dan Pemetaan Sosial Tujuan penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokkan rumah tangga di desa dalam kategori kaya, menengah dan miskin menurut kriteria dan istilah setempat. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan untuk menggambarkan rumah tangga-rumah tangga yang ada di desa pada sebuah peta. Dalam proses ini,

fasilitator harus mendokumentasikan kriteria dan daftar rumah tangga miskin.

- b. Musyawarah Penggalan Gagasan
Musyawarah penggalan gagasan adalah pertemuan kelompokkelompok/dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi berupa gagasangagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan. Kelompok yang dimaksud dalam proses penggalan gagasan adalah sekumpulan warga masyarakat (laki-laki, perempuan, atau campuran) yang tergabung dalam ikatan kemasyarakatan yang berlatar belakang wilayah seperti RT, RW, RK, Dusun, Kampung, jurong, banjar atau yang lainnya. Dokumen yang dihasilkan adalah Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah dan Daftar Gagasan.

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari Fasilitator Kecamatan. Hasil yang diharapkan dari tim penulis usulan adalah tiga proposal kegiatan berdasarkan keputusan Musdes Perencanaan yang akan diajukan ke MAD Prioritas Usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes. Dalam penyusunan dokumen-dokumen untuk musrenbang reguler, TPU merujuk kepada hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan dan bekerjasama dengan perangkat pemerintahan desa/kelurahan. Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan perkiraan besaran pembiayaannya. Desa juga dapat mengajukan usulan dengan dilengkapi desain detail dan

Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini dibenarkan oleh anggota TPU (Titin P.N).

MAD prioritas usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP dilakukan secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa lainnya, seperti dijelaskan oleh Kades Sukarara (Timan).

Kader Teknis (Suhirman) menjelaskan bahwa MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan. Jika pada saat MAD prioritas usulan, seluruh usulan telah selesai dibuat berikut detail desain dan RABnya, maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan bisa langsung diselenggarakan setelah agenda MAD prioritas usulan diselesaikan. Namun jika belum selesai desain dan RABnya, maka MAD penetapan usulan dilakukan pada waktu yang berbeda.

Musdes Informasi Hasil MAD; Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Musdes ini dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak (Keterangan dari TPK (Jalal Hamzah).

Fasilitator dalam musdes informasi hasil MAD adalah Fasilitator Kecamatan atau PjOK. Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% dari peserta Musdes informasi hasil MAD adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya desa atau masyarakat seperti dijelaskan oleh Bendahara Desa (H.Saman Budi, S.Ag).

Pengesahan Dokumen SPPB; Ketua TPK, PjOK dan Ketua UPK akan membuat SPPB, yang diketahui Kades dan Camat atas

nama Bupati. Pengesahan SPPB dilakukan langsung segera sesudah diterbitkan SPC, dan tidak perlu menunggu persetujuan dari kabupaten. Kelengkapan dokumen sebagai lampiran SPPB:

- a. Usulan kegiatan,
- b. RAB detail per kegiatan,
- c. Jadwal pelaksanaan,
- d. Formulir Penanganan Masalah Dampak Lingkungan,
- e. Komitmen sumbangan dari masyarakat,
- f. Foto 0 % dari kegiatan yang akan dibangun/dikerjakan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan; Rapat koordinasi ini difasilitasi oleh PL, Fasilitator Kecamatan dan PjOK. Rapat dihadiri oleh pengurus UPK, Kades, dan TPK setiap desa penerima dana PNPM Mandiri Perdesaan. Waktu penyelenggaraan rapat, diharapkan tidak lebih dari satu minggu setelah pelaksanaan pelatihan bagi TPK dan UPK.

Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa Pengurus TPK bersama Kades secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan di desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di desa difasilitasi oleh KPM D. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya, seperti dijelaskan oleh Ketua TPK (Sahwan Yuliardi).

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah

disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan musdes informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut: Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat; Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat miskin atau anggota RTM, dan Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musdes, dan kebutuhan tersebut di atas harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan. Hal ini dijelaskan oleh H.Saman Budi, S.Ag. bahwa kenyataannya harus dilelang sehingga partisipasi masyarakat rendah.

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi teknis oleh Fasilitator Kecamatan. Tujuan sertifikasi adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat. Terhadap semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan maka Fasilitator kabupaten berkewajiban melakukan pengujian baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan secara acak, sebagai bagian tindakan pengendalian.

Revisi Kegiatan; Apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan oleh sebab perubahan situasi di lapangan atau terjadinya bencana alam (force majeure), maka dapat dilakukan revisi selama tidak menambah besarnya Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan 34 dana bantuan dan tidak mengganti jenis kegiatan. Revisi tersebut dibuat oleh TPK dan disetujui oleh Fasilitator Kecamatan dan PjOK. Rencana revisi ini telah dimusyawarahkan TPK, Fasilitator Kecamatan dengan masyarakat. Pendataan perubahan

tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi lengkap dengan gambar perubahan dan jenis pengeluaran biaya. Kegiatan baru tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran. Adanya perubahan boleh dilakukan beberapa kali di tiap lokasi. Fasilitator Kabupaten dapat mengusulkan revisi atas dasar pertimbangan teknis dari hasil kunjungan lapangan karena ada kemungkinan kegiatan asli akan mengalami kegagalan. Namun demikian pertimbangan teknis harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Fasilitator Kabupaten dalam setiap pemeriksaannya harus memastikan bahwa seluruh perubahan yang ada telah dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Hal ini dilakukan oleh TPK untuk PNPM-MPd Desa Sukarara karena ada sisanya sehingga harus dibuatkan LPD Pengembangan yang ditandatangani oleh Ketua TPK, UPK, dan FK seperti dijelaskan oleh Ketua TPK (Sahwan Yuliadi)

Dokumentasi Kegiatan; Seluruh kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan harus didokumentasikan oleh Fasilitator Kecamatan. Meskipun demikian, untuk kepentingan desa dan kecamatan, maka TPK dan UPK juga harus mengelola dokumentasi kegiatan. Pada akhir periode pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Fasilitator Kecamatan harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yang bersangkutan. Bukan kumpulan foto dari setiap desa penerima PNPM Mandiri Perdesaan, namun sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip foto yang ada. Tetapi tidak boleh hanya foto dari satu desa saja; Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas dll.

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban TPK di desa. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan, meliputi:

- a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
- b. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)
- c. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)
- d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)
- e. Pembuatan Dokumen Penyelesaian
- f. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus)

PELESTARIAN KEGIATAN

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar, diantaranya:

- a. Hasil Kegiatan
- b. Proses Pelestarian
- c. Komponen Pendukung Pelestarian
- d. Sistem Pemeliharaan
- e. Pelatihan Pemeliharaan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan empiris Pelaksanaan PNPM-MPd dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan PNPM-MPd dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat adalah secara garis besar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin karena peluang kerja terbuka melalui kegiatan pembangunan Sarana Prasarana dengan jenis Pentaludan dan

Perkerasan Jalan Lingkungan. Dari akses jalan menuju ke desa tersebut dan ke tempat-tempat lain menjadi mudah sehingga dapat meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat sekitar sebagai Rumah Tangga Sasaran.

2. Hambatan dan faktor pendukung pelaksanaan PNPM-MPd di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat adalah:

a. Hambatan secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana namun bukan berarti tidak ada kendala atau permasalahan yang dapat dikatakan sebagai hambatan seperti: (1) Sumber daya manusia anggota masyarakat miskin masih rendah sehingga membuat penulisan usulan maupun proposal kegiatan administrasi lainnya menjadi terhambat (2) Kurang mencapai sasaran sehingga belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pengadaan material/barang yang harus dilelang sehingga partisipasi masyarakat menurun (3) Pencairan dana untuk pelaksanaan PNPM-MPd sering tidak tepat waktu sehingga pengaruh harga dan cuaca memperlambat kegiatan pembangunan (4) Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap maksud dan tujuan program yang dilakukan oleh aparat desa sehingga hasilnya kurang dimanfaatkan dan tidak dipelihara dengan baik.

b. Pendukungnya adalah (1) faktor utama pelaksanaan PNPM-MPd ini adalah pengelolaan program yang sudah terorganisasi dengan baik dari tingkat pusat, provinsi, kota, kecamatan maupun desa-desa yang menerima program ini karena program ini melibatkan banyak pihak. Dengan adanya pedoman pelaksanaan PNPM-MPd menunjukkan bahwa petunjuk implementasi sudah diusahakan selengkap mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir kesalahan. (2) faktor pendukung lainnya adalah keterbukaan yang di tunjukkan oleh aparat Desa maupun Kecamatan dan masyarakat

dalam menerima pelaksanaan PNPM-MPd ini.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan PNPM-MPd dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat adalah mengarahkan masyarakat pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan berupa pelatihan-pelatihan usaha ekonomi produktif yang konkrit dan sederhana, tetapi berpeluang besar bagi perkembangan ekonomi kerakyatan dan perlunya ditingkatkan intensitas sosialisasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan agar program-program tersebut tepat sasaran dan tidak membuat masyarakat menjadi tergantung terhadap bantuan pemerintah sehingga menjadikan masyarakat semakin tidak berdaya dan semakin miskin.

Saran-Saran

Rekomendasi ataupun saran yang ingin kami berikan berkaitan dengan pelaksanaan PNPM-MPd di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat adalah:

1. Dalam pengalokasian dana bantuan, hendaknya tidak terbatas pada bantuan sosial dan pembangunan sarana dan prasarana. Namun akan lebih baik juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan berupa pelatihan-pelatihan usaha ekonomi produktif yang konkrit dan sederhana, tetapi berpeluang besar bagi perkembangan ekonomi kerakyatan; dan alangkah baiknya keuangannya diberikan kepada desa secara otonom sehingga partisipasi masyarakat akan lebih tinggi
2. Perlunya ditingkatkan intensitas sosialisasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan PNPM-MPd di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah dalam membuat program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya hendaknya pemerintah meningkatkan jumlah anggaran sehingga pemanfaatan dan pemeliharaannya dapat

terjamin begitu juga dampaknya akan lebih dirasakan oleh semua masyarakat desa sebagai Rumah Tangga Sasaran sehingga mereka tidak hanya menjadi TKI/TKW yang dikorbankan oleh majikannya di luar negeri.

Sondang P. Siagian, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam I. Indrawijaya, 2002. *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru Algesindi, Bandung.
- Bennis, Warren G, 1969. *Changing Organization*, Mac. Graw Hill, New York.
- Barata, Atep Adya, 2004. *Dasar Dasar Pelayanan Prima*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta.
- BPPSPAM, *Pengukuran Kinerja PDAM.*, www.bppspam.go.id
- Fandy Tjiptono, 1997. *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandi, 2004. *Prinsip-prinsip Total Quality Service*. Edisi Ke-empat. ANDI Yogyakarta.
- Gerson Richard, F., 2000. *Mengukur Kepuasan Pelanggan*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Gibson, at al, 1984. *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Gerson Richard, 2000. *Mengukur Kepuasan Pelanggan*, penerbit PPM, Jakarta.
- Herbert G Hicks dan G Ray G, 1996. *Organisasi Teori dan Tingkat Laku*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Joedo, Hari.S, dan Nugroho. D Riant, 2006. *“Reinventing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”*, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo.
- Jack, Duncan W., *Organization Behavior*, 1981. *Second Ed.* Boston. Houghton Mifflin Coy.
- Keputusan Men.PAN Nomor: 63/ KEP/M. PAN/7/2003.
- Moh. Pabundu Tika, 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Prianto, Agus, 2006. *Menakar Kualitas Pelayanan Publik*, In TRANS, Malang.